

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arto, Mukti, 1996, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2008, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1983, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Simanjuntak, P.N.H, 2007, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Depok.
- Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta
- Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 147.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Tutik, Titik Triwulan, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem peradilan Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.

### B. Tugas Akhir

- Mauludin, Fakhrul, 2021, *Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Permohonan dari Status Wali Pengampu (Studi Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Nomor 137/PDT.P/2019/PN MDN)*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan.
- Wahyuni, Novita Ika Setya, 2019, *Tanggung Gugat Pengampu dalam Pengurusan Harta Waris Curandus*, Tesis, Program Magister Kenotariatan Universitas Narotama, Surabaya.

Yunanda, Niken Retfi, 2020, *Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengampuan Perempuan Dewasa yang Mengalami Cacat Fisik dan Mental Berdasarkan Perkara Nomor: 02/Pdt. P/2019/PN. Rgt*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 100)

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali

Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

### D. Jurnal

Agustina, Shinta, *"Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana,"* MMH, 44, no. 4, Oktober 2015.

Aisyah, Nur, *"Peranan Hakim Pengadilan Agama Dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia"*, Jurnal Al-Qadau, Vol. 5, No. 1, Juni, 2018 <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5665>.

Awalin, Yoki Mustaf dkk., *"Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Mengenai Permohonan Pengampuan (Curatele) Atau Perwalian oleh Istri Sah Terhadap Suaminya Sendiri (Studi Putusan Nomor*

35/Pdt.P/2020/Pn.Tjk)", *Jurnal Hukum Malahayati*, Volume 3, Nomor 2, November 2022, hlm.

Dahlan, Ramlah dan Abdollah Reza, "Pengangkatan Anak dan Hubungannya dengan Perwalian dalam Tinjauan Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Kasus di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A)", *Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1, Januari 2022.

Halilah, Siti dan Mhd. Fakhrurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2, Desember 2021, <http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/>.

Ivada, Naili dkk., "Kompetensi Absolut Peradilan Agama dalam Mengadili Perkara yang di dalamnya Terdapat Sengketa Hak Milik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 546/K/Ag/2018)", *Jurnal Lex Specialis*, Vol. 1, No. 2, November 2020.

Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, Vol.1, No. 1, 2019.

Mustari, Zir Nuriyah, dkk, "Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dalam Mengadili Sengketa Tata Usaha Negara (Analisis Perkara Putusan No. 13/Pdt.G/2020/PN.Pmk)", *Jurnal Yustitia*, Vol. 24, No. 2, Desember 2023.

Rais, Isnawati, dan Ya Rakha Muyassar. "The Construction of Religious Court Judges' Decisions in the Case of Joint Assets Based on Islamic Law and Legal Development." *Jurnal Cita Hukum*, Vol.10, No. 2, Agustus 2022.

Sagala, Mangisi Tua dkk., "Tinjauan Yuridis Peran Balai Harta Peninggalan Dalam Melindungi Harta Orang Yang Berada Dibawah Pengampuan (Analisis Penetapan Nomor 877/Pdt.P/2022/ PN Mdn)", *Jurnal Darma Agung*, Vol. 32, No. 5, Oktober 2024.

Sisilya, Lauditta Humaira, dan Iffah Karimah. "Penetapan Pengampuan Berdasarkan Putusan MK No. 93/PUU-XX/2022 dan UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan," *Lex Patrimonium*, Vol. 3, no. 1, 2024.

Siswanta, Anggitariani Rayi Larasati, et al., "Kecakapan Hukum Bagi Penderita Gangguan Bipolar Dalam Perspektif Hukum Perdata," *Prosiding Seminar UNARS*, Vol. 3, no. 1, July 2024.

Sutiawati, Sutiawati, "Application of the Principle of Lex Specialis Derogat Legi Generali in Cases of Domestic Violence with Unofficial

*Marriage Status*,” Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 26, no. 2, 2023.

Fikri Rahmananda, “*Penemuan Hukum Hakim Pengadilan Agama dalam Penetapan Wali Pengampu dan Implikasinya terhadap Pengurusan Harta dan Pengalihan Hak Atas Tanah*”, Veritas et Justitia, Volume 11 Nomor 2, Tahun 2025.

Windajani, Imma Indra Dewi, “*Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perdata Orang yang Tidak Cakap Hukum di Kabupaten Sleman*,” Mimbar Hukum, Vol. 20, no. 3, 2008.

Wirya, Albert dkk, *Asesmen Hukum Pengampunan Indonesia: Perlindungan Hak Orang dengan Disabilitas Psikososial* (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Oktober 2020), diakses 10 Juni 2025, [https://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2020/10/Asesmen-Hukum-Pengampunan-Indonesia\\_LBHM.pdf](https://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2020/10/Asesmen-Hukum-Pengampunan-Indonesia_LBHM.pdf).

Zuliah, Azmiati dan Fitri Amalia, “*Penerapan Adagium Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*,” Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 5, no. 2, Februari 2025.

## E. Internet

Ananda, Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, diakses dalam <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/?srsltid=AfmBOopqfuw-of9XoqJkrUJTMvZv6cxp6nkEGLKnfQTuOjN11CQskbJ9> pada tanggal 1 Juli 2025.

Balai Harta Peninggalan (BHP), *Standar Layanan*, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah <https://jateng.kemenkum.go.id/layanan-2/standar-layanan/adm-hukum-umum-2/balai-harta-peninggalan-bhp>, diakses 21 Juni 2025.

Balai Harta Peninggalan Jakarta, “Pengurusan Pengampunan,” <https://bhpijakarta.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pengampunan>, diakses 11 Desember 2024.

Hukumonline, “Mengetahui Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengetahui-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis-lt631f21adec18c/?page=2> diakses 11 Juli 2025

Pengadilan Negeri Pasangkayu, “Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama”, <https://www.pn-pasangkayu.go.id/index.php/penelusuran-perkara/artikelpn/1110->



**Dualisme Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Terkait Penetapan Permohonan Pengampunan**

**Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum**

Wafa Syarifah Salsabila, Hasrul Halili, S.H., M.A.

Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

[kompetensi-pengadilan-negeri-dan-pengadilan-agama-2](#), diakses

13 Desember 2024